

OPINI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA DI KABUPATEN WAJO

Public Opinion on the Implementation of Village Fund Program in Wajo Regency

Saiful¹, Alwi², Muh Akbar³

¹ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Kabupaten Wajo (email : saifulmd1980@gmail.com)

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi
Pascasarjana Universitas Hasanuddin (email : alwiazis_63@yahoo.com)

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi
Pascasarjana Universitas Hasanuddin (email : bos_akbar@yahoo.com)

ABSTRACT

Implementation of village fund program in Wajo cause a variety of responses and opinions from various circles. The aims of this study were to assess public opinion and community leaders opinion on the implementation of the village fund program in Wajo. The method used in this research, is a qualitative approach. The object of this research that the public and community leaders on the District Tanasitolo Wajo. The research data was collected through observation, interview, and documentation. Data were analyzed through three grooves activities going on simultaneously: data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study indicated that community elements considered themselves less involved in the village fund programs, the development of infrastructure was appropriate because It was relevant to community needs, and they were less concerned with the accountability of public funds. community leaders were often involved in the meetings and were active in the decision making process. For leaders, village fund should also be used for community empowerment and community economic development, and necessity of village institution control.

Keywords : Opinion, The village Fund, Accountability, Infrastructure

ABSTRAK

Pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo menimbulkan berbagai tanggapan dan opini dari berbagai kalangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji opini masyarakat dan opini tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat pada Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo yaitu masyarakat menganggap kurang dilibatkan, pembangunan infrastruktur sudah tepat karena sesuai kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban dana desa masyarakat kurang peduli. Tokoh masyarakat sering dilibatkan dalam musyawarah desa serta aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sebaiknya dana desa digunakan juga untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta diperlukan adanya pengawasan dari lembaga-lembaga desa.

Kata Kunci : Opini, Dana Desa, Pertanggungjawaban, Infrastruktur

PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

merupakan berita baik bagi masyarakat
khususnya masyarakat yang bermukim di
desa. Tujuan dari Undang-Undang

tersebut antara lain memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah besarnya dana pembangunan yang diperuntukkan bagi desa dalam bentuk dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun untuk 74.093 desa. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp.46,98 triliun yang dialokasikan kepada Rp. 74.754 desa seluruh Indonesia.

Pemberian dana desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil, yang menjadi isu strategis dibuktikan dengan masuk menjadi Cita ke 3 Nawa Cita Presiden Jokowi-JK, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melalui program dana desa masyarakat ditempatkan sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan di daerahnya. Desa benar-benar menjadi subjek, tak lagi sekedar objek. Karena selama ini, desa hanya menjadi objek pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat mengawasi pemanfaatan dana desa. Dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diharapkan program ini dapat tepat sasaran. Sedangkan pemerintah desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat (Widjaja, 2010).

Sebelum pelaksanaan program dana desa. Berbagai pendapat atau opini berkembang di masyarakat. Harapan masyarakat bahwa program dana desa akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik sangat besar. Di samping itu ada juga semacam keraguan akan keberhasilan program ini. Keraguan ini didasarkan pada kurangnya kemampuan sumber daya manusia dari pemerintah desa dalam mengelola dana yang jumlahnya sangat besar, kurangnya partisipasi masyarakat, dan mekanisme pengawasan yang belum jelas.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan keuangan desa menemukan 14 temuan pada aspek regulasi dan kelembagaan; aspek tata laksana; aspek pengawasan; dan aspek sumber daya manusia (www.kpk.go.id). Pada aspek tata laksana, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah; laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi; serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Keberhasilan sebuah kebijakan atau program pemerintah sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan partisipasi/keterlibatan masyarakat sebagaimana di katakan Huntington & J.Nelson dalam Abidin (2004), bahwa kebijakan yang dianggap tepat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat akan mendapat dukungan. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap tidak tepat akan mendapat tantangan.

Kemampuan Kepala Desa beserta aparatnya dalam mengelola dana desa khususnya dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel adalah

suatu keharusan supaya dana desa ini dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan karakteristik masyarakat desa setempat. Jika tidak maka dapat dipastikan bahwa dana desa yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai.

Kabupaten Wajo pada tahun 2015 mendapatkan dana desa dari APBN sebesar Rp.38,795,602,000,- sedangkan untuk tahun 2016 meningkat menjadi sebesar Rp.87,194,141,000,- yang dialokasikan kepada 142 desa. Besarnya jumlah dana desa tersebut dan dengan melihat kondisi wilayah Kabupaten Wajo dengan jumlah desa 142 desa yang tersebar di 14 kecamatan, dan dari 142 kepala desa 57 orang diantaranya adalah kepala desa yang baru terpilih pada awal tahun 2014 yang sama sekali belum memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai kepala desa menimbulkan keraguan akan kemampuan mereka mengelola dana desa tersebut.

Selain keraguan akan kemampuan pemerintah desa beserta aparatnya dalam mengelola dana tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa dan penggunaan dana desa yang lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal menarik dan mendapatkan berbagai tanggapan serta menimbulkan munculnya berbagai opini di masyarakat

Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji opini masyarakat dan opini tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Kabupaten Wajo dimana fokus penelitian akan dilakukan pada masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Tanasitolo. Alasan memilih lokasi tersebut karena berdasarkan data yang diperoleh

dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa / Kelurahan Kabupaten Wajo pada tahun 2015 diketahui bahwa Kecamatan Tanasitolo merupakan daerah yang mendapatkan dana desa paling besar dari 14 Kecamatan yang ada.

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, pada prinsipnya ingin memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna (*meaning*) dalam konteks yang sesungguhnya (*natural setting*) (Yusuf, 2014).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji opini masyarakat dan opini tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo.

Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur masyarakat dan unsur tokoh masyarakat. Informan yang dipilih merasakan dampak dari program dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teknik Observasi, Teknik Wawancara mendalam, dan Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagaimana yang dikatakan Miles & Huberman yang dikutip oleh Tanzeh & Suyitno (2006), dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga alur kegiatan tersebut akan

digunakan untuk mengkaji opini masyarakat dan opini tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo.

HASIL PENELITIAN

Opini Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Wajo

Pelaksanaan Program Dana desa melibatkan berbagai kalangan baik dari unsur pemerintah maupun dari masyarakat. Unsur pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa semuanya terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Masyarakat desa adalah pihak yang berkepentingan dalam program ini. Dengan adanya program ini masyarakat desa atau desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tapi diharapkan menjadi subjek atau pelaku utama pembangunan di desanya. Kalau dulu kita mengenal istilah membangun desa maka dengan adanya program dana desa paradigma tersebut berubah menjadi desa membangun artinya bahwa dalam pelaksanaan program ini masyarakat desa menemukan, merencanakan, melaksanakan sendiri setiap kegiatan yang menjadi permasalahannya dan diharapkan berpartisipasi aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses pengawasan.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana opini masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo pada tiga desa yaitu Desa Mario, Desa Nepo dan Desa Ujunge. Pelaksanaan program dana desa di tingkat desa diawali setelah adanya penetapan besaran jumlah dana desa setiap desa dari Pemerintah Kabupaten. Pemerintah desa kemudian melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan serta pengawasan.

Opini masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatannya dalam program. Sebagaimana diketahui bahwa

Opini itu tergantung pada sensasi-sensasi yang didasarkan pada informasi sensori dasar. Yang dimaksud dengan informasi dasar adalah informasi yang sesungguhnya terjadi sampai pada alat indra kita. Untuk membuat sesuatu agar lebih bermakna diperlukan adanya keterlibatan aktif dan aktifitas indrawi yang berhubungan pengamatan interpretasi.

Masyarakat mendapatkan informasi tentang program dana desa melalui media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak atau informasi dari tokoh masyarakat dan sosialisasi dari pemerintah. Sedangkan dalam hal keterlibatan masyarakat dalam program dana desa memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan masih sebatas berpartisipasi dalam mengikuti pertemuan tetapi kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Opini masyarakat dalam hal pelaksanaan program dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan jalan dapat memudahkan akses distribusi hasil-hasil pertanian serta perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan hasil produksi para petani. Selain itu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan secara swakelola dan padat karya akan memberikan nilai tambah penghasilan harian bagi masyarakat karena dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.

Sedangkan masalah pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, masyarakat menganggap hal tersebut merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari pemerintah desa. Harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa adalah selain untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya dana desa digunakan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha.

Opini Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Wajo

Program dana desa yang merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Desa. Program dana desa merupakan suatu program baru dari pemerintah. Program ini menjanjikan banyak harapan akan adanya perubahan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Informasi tentang program ini merupakan hal yang menarik bagi media untuk diberitakan. Salah satu kelebihan dari tokoh masyarakat dibanding masyarakat kebanyakan adalah mereka lebih mudah untuk mengakses dan lebih tertarik terhadap informasi baru.

Tokoh masyarakat mendapatkan informasi tentang program dana desa melalui media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak serta melalui sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa. Peran seorang tokoh masyarakat dalam setiap program pemerintah khususnya di pedesaan sangat besar. Berbagai perubahan dan kemajuan masyarakat sangat ditentukan oleh peran tokoh masyarakat.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam program dana desa menggambarkan tokoh masyarakat menganggap sudah dilibatkan dalam perencanaan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Setiap kegiatan musyawarah tokoh masyarakat penggunaan dana desa. walaupun masih ada sebagian anggota lembaga desa yang belum terlibat.

Opini tokoh masyarakat dalam hal pelaksanaan program dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa program dana desa tersebut dirasakan sudah tepat karena lebih memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur desa berupa jalan, jembatan serta irigasi yang merupakan kebutuhan masyarakat dimana hal tersebut dirasakan sudah sangat mendesak. Namun demikian, menurut beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten

Wajo mengatakan bahwa program dana desa ini juga sebaiknya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat seperti pemberian modal usaha, hal ini dianggap penting mengingat pemberdayaan serta pengembangan masyarakat merupakan salah satu faktor yang juga penting untuk dilakukan. Sedangkan terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, tokoh masyarakat menganggap perlunya pengawasan dari lembaga desa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat kurang dilibatkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan program dana desa. Masyarakat menganggap bahwa mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa namun masih terbatas pada kehadiran dalam musyawarah. Masyarakat kurang dilibatkan dalam merumuskan rencana kegiatan karena yang banyak terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan adalah para tokoh masyarakat atau anggota lembaga desa.

Keengganan masyarakat untuk cenderung diam dan tidak mengungkapkan pendapatnya dalam musyawarah desa disebabkan karena adanya kepercayaan dan keyakinan mereka berdasarkan apa yang mereka alami selama ini bahwa dalam pengambilan keputusan yang berperan adalah pemerintah desa sendiri bersama sebagian kecil orang-orang yang masuk dalam struktur lembaga desa dan hal ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat desa. mereka yang berada di pihak mayoritas akan merasa percaya diri dengan pengaruh dari pandangan mereka dan terdorong untuk menyampaikan kepada orang lain. Mereka yang memiliki pandangan yang menjadi minoritas biasanya cenderung untuk berhati-hati dalam berbicara atau bahkan diam saja. Hal ini akan memperkuat pandangan publik bahwa pendapat mereka lemah (Morissan, 2013).

Menanggapi pelaksanaan program dana desa yang lebih diprioritaskan untuk

pembangunan infrastruktur masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani menganggap bahwa hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rejecki dalam Ruslan (2010), bahwa salah satu komponen yang membentuk opini adalah komponen komponen *Affect* (perasaan atau emosi). Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen afektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian baik atau buruk.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa kecenderungannya tidak ditanggapi oleh masyarakat dan menganggap hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah Desa. Dalam praktek komunikasi, usaha untuk membentuk dan mengubah pendapat seseorang biasanya diawali dengan mencoba memberi wawasan untuk memengaruhi sikapnya. Terkait dengan hal tersebut masyarakat lebih tertarik untuk membicarakan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mereka dibanding masalah pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Masyarakat menganggap bahwa mencampuri urusan pertanggungjawaban penggunaan dana desa merupakan hal yang tidak lazim bagi masyarakat. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah desa maka yang harus mempertanggungjawabkan adalah pemerintah sendiri. Apalagi mulai dari proses perencanaan masyarakat merasa tidak dilibatkan. Sebagaimana Nimmo (2011), mengemukakan bahwa opini ialah tindakan mengungkap apa yang dipercayai, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek-objek dan situasi tertentu dengan demikian publik adalah khalayak terhadap sesuatu objek atau situasi tertentu yang

dipercayai, dinilai baik dan benar atau diharapkan.

Menurut Mayor Polak dalam Sunarjo (1984), pengertian publik (khalayak ramai) adalah sejumlah orang yang mempunyai minat sama terhadap suatu persoalan tertentu. Mempunyai minat yang sama tidak berarti mempunyai pendapat yang sama. Dengan demikian, publik adalah sejumlah orang yang berminat dan merasa tertarik terhadap suatu masalah dan berhasrat mencari suatu jalan keluar dengan mewujudkan tindakan yang konkret. Hal ini terjadi pada masyarakat desa, sehingga masyarakat sebagai publik mempunyai beragam opini terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo.

Informan dalam penelitian ini berasal dari beberapa tokoh masyarakat yang berasal dari profesi yang berbeda. Seperti apa yang dikatakan Jackson Baur dalam Cangara (2014), seorang pakar pendapat umum berkebangsaan Amerika, mengemukakan bahwa proses pembentukan pendapat dapat dipahami dari proses terbentuknya pendapat seseorang, salah satunya adalah karena faktor sosial yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat memberi banyak pengaruh pada sikap atau pendapatnya.

Salah satu ciri dari tokoh masyarakat adalah lebih tinggi pengenalan medianya. Sehingga lebih cepat mendapatkan informasi terkait hal-hal baru. Tokoh masyarakat dalam penelitian ini lebih mudah mendapatkan informasi terkait pelaksanaan program dana desa. Selain mendapatkan informasi dari media mereka juga mendapatkan informasi melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah Kabupaten maupun pemerintah desa itu sendiri.

Keterlibatan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa khususnya pada tahapan perencanaan cukup besar. Hal ini tidak terlepas dari peran tokoh masyarakat atau pemuka pendapat sebagai seseorang yang dipercaya

untuk menyampaikan informasi dan menyatakan pendapatnya kepada masyarakat. Memiliki keunggulan dari masyarakat kebanyakan, juga mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada.

Opini tokoh masyarakat tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur adalah mereka menganggap kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dominan adalah petani. Namun di satu sisi tokoh masyarakat juga menyadari ada sebagian kecil masyarakat yang membutuhkan kegiatan lain seperti untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Noelle Neuman dalam West & Turner (2008), mengemukakan tiga asumsi teori spiral kebisuan diantaranya rasa takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini dan perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. Opini tokoh masyarakat terhadap penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh penilainnya bahwa sebagian besar masyarakat setuju akan pembangunan infrastruktur karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hennessy dalam Olli & Erlita (2011), menyebutkan bahwa opini publik berkumpul disekitar isu (*preperence of issue*). Termasuk didalamnya isu tentang pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Kabupaten Wajo. Opini tokoh masyarakat terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berbeda dengan opini masyarakat. Tokoh masyarakat menganggap sejauh ini sudah baik namun diperlukan pengawasan dari lembang-lembaga desa. Opini ini dipengaruhi oleh persepsi tokoh masyarakat yang sebagian besar juga adalah anggota lembaga desa. Tokoh masyarakat menganggap perlunya ada keterlibatan dan pengawasan lembaga desa terhadap penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ruslan (2010), persepsi yang merupakan awal terbentuknya opini disebabkan oleh latar belakang budaya, nilai-nilai yang dianut, pengalaman masa lalu dan berita yang berkembang. Faktor budaya dan nilai-nilai yang ada di daerah pedesaan menganggap bahwa tokoh masyarakat adalah orang-orang yang dianggap mampu untuk menjadi sumber informasi serta menjadi tempat menyampaikan setiap permasalahan masyarakat. Olehnya itu tokoh masyarakat yang juga merupakan anggota lembaga desa merasa bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan opini masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo yaitu masyarakat menganggap kurang dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan masih sebatas berpartisipasi dalam mengikuti pertemuan tetapi kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat menganggap sudah tepat karena itu merupakan kebutuhan masyarakat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban dana desa masyarakat kurang peduli dan menganggap bahwa hal itu adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah desa. Opini tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Wajo yaitu tokoh masyarakat sering dilibatkan dalam musyawarah desa serta aktif dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, tokoh masyarakat berpendapat selain untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk pertanggungjawaban dana desa diperlukan

adanya pengawasan dari lembaga-lembaga desa. Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan mengoptimalkan tenaga pendamping desa dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat dan meningkatkan jumlah anggaran dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat serta meningkatkan insentif kepada lembaga-lembaga desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Z. S. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Cangara H. (2014). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Morissan. (2013). *Teori Individu hingga massa*. Jakarta : Pustaka Prenada Media Group.
- Nimmo. (2011). *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*. Pengantar Jalaluddin Rakhmat. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Olli H & Erlita N. (2011). *Opini Publik*, Jakarta : PT Indeks.
- Ruslan R. (2010). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta Utara : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sunarjo D. (1984). *Pendapat Publik*, Yogyakarta : Liberty.
- Tanzeh A. & Suyitno. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surabaya : eLKAF.
- West & Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Buku 1*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Widjaja H. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Yusuf M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.